

PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN, REMUNERASI DIREKSI, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DIMODERASI OLEH KOMITE AUDIT PADA BUMN BIDANG KEUANGAN NON PUBLIK

Herlina Fransisca Sitompul

STIE Tri Bhakti

herlina08sitompul@gmail.com

Mochamad Muslih

STIE Tri Bhakti

mochamadmuslih@stietribhakti.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh tata kelola perusahaan, remunerasi direksi, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan yang dimoderasi oleh komite audit pada BUMN Bidang Keuangan non public tahun 2012 – 2018. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasinya adalah BUMN Bidang keuangan non publik. Sampel berjumlah (tujuh) BUMN Bidang Keuangan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu PT Pegadaian, Perum Peruri, PT Tugu Pratama, PT Asabri, PT Jamkrindo, PT PNM, PT Pengelola Aset. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, remunerasi direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, Jumlah pertemuan komite audit tidak memoderasi pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan, Jumlah pertemuan komite audit tidak memoderasi pengaruh remunerasi direksi terhadap kinerja perusahaan, dan jumlah pertemuan komite audit tidak memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan.

Kata kunci : Tata Kelola Perusahaan, Remunerasi Direksi, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Kinerja Perusahaan (ROA).

Abstract

The purpose of this research was to study the effect of good corporate governance, the remuneration of the board of directors, and company size on the company performance which is moderated by audit committees in non public SOE finance companies in 2012 – 2018. This study uses a quantitative method. The Population in non public SOE finance companies .The sample is 7 (seven) SOEs in the Financial Sector that are not listed on the Indonesia Stock Exchange , namely PT Pegadaian, Perum Peruri, PT Tugu Pratama, PT Asabri, PT Jamkrindo, PT PNM, and PT Asset Management. The result showed that the good corporate governance had no significant effect on company performance, the directors' remuneration did not significantly influence company performance, and company size had a significant effect on company performance, the number of Audit Committee meetings had no moderated effect good corporate governance on company performance, the number of Audit Committee meetings had no moderated effect directors' remuneration on company performance, and the number of Audit Committee meetings had no moderated effect company size on company performance.

Keywords : *Good Corporate Governance, remuneration of directors, company size, Audit Committee meetings, Company performance.*

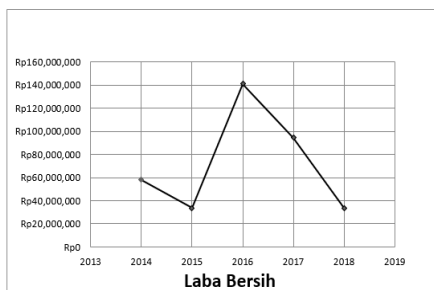
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Perusahaan BUMN di Indonesia terbagi dalam 13 bidang usaha BUMN. Salah satunya BUMN yang bergerak di bidang asuransi, Contoh BUMN Bidang Asuransi non publik misalnya Pegadaian, PT Peruri, PT Tugu Pratama, PT Asabri, PT Jamkrindo, PT PNM, PT Pengelola Aset, dll. Kinerja perusahaan-perusahaan tersebut cukup menggembarakan pada dekade terakhir, walaupun belum menjadi perusahaan public namun labanya relatif meningkat setiap tahunnya sehingga masih bertahan hingga saat ini. Tetapi masih terdapat beberapa perusahaan BUMN yang mengalami kerugian disebabkan oleh masalah kesulitan keuangan, salah satunya Asuransi Jiwasraya, Asuransi ini terpaksa menunda pembayaran kewajiban polis jatuh tempo di produk *bancassurance*, nilainya mencapai RP 802 miliar karena kesulitan likuiditas.

Dalam era globalisasi saat ini kinerja suatu perusahaan harus semakin ditingkatkan, oleh karena itu setiap perusahaan berusaha untuk dapat mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien dalam mengembangkan *Competitive Advantage* agar dapat memenangkan persaingan dalam bisnis. Salah satunya ialah perusahaan keuangan BUMN yang bergerak dalam bidang Asuransi.

Pencapaian prestasi dan kinerja suatu perusahaan Asuransi dapat diketahui dari pencapaian labanya dan reventuennya. Pada saat ini bidang Asuransi memegang peranan yang penting karena banyak perusahaan, karyawan, bahkan sejumlah masyarakat yang menggunakan jasa asuransi.



Sumber: Diolah Penulis

Gambar 1.1-1 Tren Laba Bersih

Dari data perolehan laba bersih yang dicapai oleh perusahaan Pegadaian di atas bahwa adanya kenaikan laba setiap tahunnya, itu berarti hasil kinerja yang dicapai oleh pegadaian bagus selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Tetapi kalo dilihat data laba bersih Peruri dan Tugu Pratama bahwa labanya naik turun tidak relatif meningkat setiap tahunnya, tetapi kalo dilihat dari total keseluruhan setiap tahunnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi BUMN non publik ini terjadi peningkatan secara signifikan dan ditahun berikutnya adanya penurunan secara signifikan juga, bisa disimpulkan bahwa laba bersih setiap tahunnya tidak stabil. Oleh karena itu perusahaan ini perlu menyiapkan pedoman perusahaan yang terstruktur dengan baik sehingga meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. *Corporate governance* merupakan susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan stakeholder internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya (FCGI, 2003).

Tata kelola perusahaan yang baik mengharuskan dewan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan secara terus menerus. Secara umum, terdapat beberapa komite yang dijadikan sebagai fungsi pengawasan oleh dewan komisaris. Salah satu komite yang dijadikan sebagai alat pengawas adalah komite audit. Peran komite audit sebagai penunjang tugas dari dewan komisaris adalah membantu dewan komisaris untuk mengkaji laporan keuangan yang akan diterbitkan kepada pihak eksternal, mengkaji kebijakan akuntansi untuk memastikan bahwa perusahaan telah mengikuti peraturan yang berlaku, membahas laporan dari audit internal dan tugas lain yang diminta oleh dewan komisaris. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sangatlah penting untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Melalui Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) NO. Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN , BUMN pun wajib menerapkan prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG yang diwajibkan melalui keputusan tersebut antara lain adalah prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan prinsip kewajaran. Dengan penerapan GCG, diharapkan nilai BUMN akan menjadi lebih maksimal dan dapat meningkatkan kontribusinya bagi perekonomian nasional. Pada Tahun 2011 telah dibuat kembali Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang penerapan GCG pada BUMN yang telah mewajibkan bagi setiap BUMN untuk wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.

Persaingan antar perusahaan di zaman sekarang semakin meningkat sehingga menuntut perusahaan untuk unggul dalam bersaing dengan cara memanfaatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Salah satu yang menjadi pendorong kinerja perusahaan adalah tingkat remunerasi komisaris. Dengan ditingkatkannya remunerasi, maka komisaris sebagai organ pengarah dan pengawas atas pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan akan bekerja semakin giat. Remunerasi direksi juga dapat menjadi salah satu pendorong kinerja perusahaan. Dengan adanya pemberian remunerasi akan meningkatkan kinerja, baik kinerja perusahaan maupun kinerja karyawan yang dipengaruhi oleh remunerasi, motivasi, dan komitmen dari masing-masing karyawan itu sendiri. Direksi tentunya hanya akan bertindak sesuai dengan keinginan perusahaan bila diberikan remunerasi yang cukup, sesuai dengan tugas-tugasnya. Remunerasi komisaris dan direksi BUMN diatur oleh Kementerian BUMN. Dalam Salinan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER – 01 / MBU / 06 / 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER – 04 /MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara disebut pada pasal 4A bahwa seseorang yang mempunyai kemampuan khusus yang mendapat tugas menjadi Direksi untuk penyehatan / restrukturisasi atau peningkatan kinerja luar biasa pada suatu BUMN, dapat diberikan penghasilan tambahan di atas gaji berdasarkan keputusan RUPS / Menteri.

Pencapaian prestasi dan kinerja suatu perusahaan asuransi dapat diketahui dari pencapaian labanya dan reventunya. Pada saat ini bidang asuransi memegang peranan yang penting karena banyak perusahaan, karyawan, bahkan sejumlah masyarakat yang menggunakan jasa asuransi. Pencapaian prestasi dan kinerja suatu perusahaan asuransi dapat diketahui dari pencapaian labanya dan pendapatannya. Pada saat ini bidang asuransi memegang peranan yang penting karena banyak perusahaan, karyawan, bahkan sejumlah masyarakat yang menggunakan jasa asuransi.

KAJIAN PUSTAKA

Agency Theory

Teori *agency* (teori keagenan) merupakan hubungan kontrak antara pemilik perusahaan (prinsipal) dengan pihak manajemen (agen), dimana pemilik perusahaan memberikan wewenang kepada manajemen untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Pemilik perusahaan mengharapkan manajemen dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk mensejahterahkan *principal* dalam jangka pendek maupun jangka Panjang (Godfrey, 2010).

Agency theory mempelajari hubungan antara prinsipal dengan manajer sebagai agen perusahaan. Menurut Scott (2015, hal 358) *agency theory* mempelajari rancangan kontrak untuk memotivasi agen yang rasional untuk melakukan tindakan atas *principal*, sehingga apabila terjadi perbedaan kepentingan agen dan kepentingan *principal* akan menimbulkan konflik.

Kinerja Perusahaan

Khaerul Umam (2010) mengemukakan bahwa kontribusi hasil penilaian merupakan suatu yang sangat bermanfaat bagi perencanaan kebijakan organisasi, secara terperinci, penilaian kinerja bagi organisasi adalah sebagai berikut:

Penyesuaian – penyesuaian kompensasi;

- a. Perbaiki kinerja.
- b. Kebutuhan latihan dan pengembangan.
- c. Pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, pemecatan, pemberhentian, dan perencanaan tenaga kerja.
- d. Untuk kepentingan penelitian pegawai.
- e. Membantu diagnosis terhadap kesalahan desain pegawai.

Tujuan penilaian kinerja adalah menentukan efektivitas operasi perusahaan yang telah dilakukan. Penilaian kinerja dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. Kinerja Keuangan yaitu menggunakan satuan pengukuran keuangan seperti laba tahun berjalan, *return on asset*, *return on equity* dan sebagainya, yang menjadi *proxy* kinerja perusahaan yang akan digunakan dalam penelitian adalah *return on asset* (ROA).
- b. Kinerja non- keuangan yaitu melakukan pengukuran dengan menggunakan satuan pengukuran non-keuangan seperti kepuasan pelanggan dan kepuasan pegawai.

Return On Asset (ROA)

Return on Asset merupakan salah satu jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai seberapa baik kinerja suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dan pemanfaatan aset yang dimilikinya. ROA merupakan hasil dari perbandingan antara laba bersih (*earning after tax*) perusahaan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan.

Sedangkan Menurut Hery (2016:193) *return on asset* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset, semakin tinggi hasil dari rasio ini maka semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin rendah hasil rasio ini maka semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan. Secara matematis ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan struktur dan proses yang ada dalam perusahaan. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (1996), dalam Pedoman Umum GCG, mendefinisikan GCG sebagai komitmen, aturan main, dan praktek penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika.

Untuk keperluan pengaturan implementasi GCG di BUMN Indonesia, dalam Keputusan Kementerian BUMN No.117 tahun 2002 pasal 1 disebutkan bahwa *Corporate Governance* adalah suatu proses dan Struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka Panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Dalam keputusan kementerian BUMN tersebut disebutkan bahwa BUMN wajib menerapkan *good corporate governance* secara konsisten dan atau menjadikan *good corporate governance* sebagai landasan operasionalnya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan nilai pemegang saham.

Menurut peraturan Kementrian Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER — 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pada Badan Usaha Milik Negara *Good Corporate Governance* merupakan prinsip – prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang – undangan dan etika berusaha. Dalam Peraturan Kementrian Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dan kekayaan negara yang dipisahkan.

Tujuan Penerapan Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN pasal 4 Penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN, bertujuan untuk yaitu :

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum.
3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Pengukuran *Good Corporate Governance*

1. BUMN wajib melakukan pengukuran untuk mengidentifikasi pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam bentuk:
 - a. Penilaian (*assessment*), yaitu program mengidentifikasi pelaksanaan *Good Corporate Governance* di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan *Good Corporate Governance* di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun.

- b. Evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan *Good Corporate Governance* di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.
2. Sebelum pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didahului dengan tindakan sosialisasi *Good Corporate Governance* pada BUMN yang bersangkutan.
3. Pelaksanaan penilaian pada prinsipnya dilakukan oleh penilai (*assessor*) independen yang ditunjukkan oleh dewan komisaris/dewan pengawas melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang, dan jasa masing-masing BUMN, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan direksi dalam proses penunjukannya.
4. Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang *Good Corporate Governance*, yang penunjukannya dilakukan oleh direksi melalui penunjukan langsung.
5. Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMN yang bersangkutan (*self assessment*), yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan (*asistensi*) oleh penilai independen atau menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang *Good Corporate Governance*.
6. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator/parameter yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN.
7. Dalam hal ini evaluasi dilakukan dengan bantuan penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang *Good Corporate Governance*, maka penilai independen atau instansi pemerintah yang melakukan evaluasi tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya.
8. Sebelum melaksanakan penilaian, penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat), menandatangani perjanjian kesepakatan kerja dengan Direksi BUMN yang bersangkutan yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan biaya pelaksanaan.
9. Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS/Menteri bersamaan dengan penyampaian Laporan.

Jumlah Pertemuan Komite Audit

Keputusan Ketua badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-643/NL/2012 menetapkan bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota, keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat.

Remunerasi Direksi

Menurut Neokleous dalam Probohudono, dkk (2016) remunerasi merupakan imbalan atau balas jasa terhadap kinerja karyawan yang diwujudkan dalam bentuk finansial dan nonfinansial. Imbalan tersebut dapat berupa gaji, bonus, opsi saham, dana pensiun, dan lainnya. Dalam suatu perusahaan, remunerasi tidak hanya diberikan kepada karyawan saja, tetapi remunerasi juga diberikan kepada manajemen.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 bahwa remunerasi merupakan imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada dewan direksi, dewan komisaris,

pegawai yang bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai disesuaikan dengan tugas dan wewenang masing-masing.

Ukuran Perusahaan

Pengertian Ukuran Perusahaan menurut Jogiyanto (2016:282) adalah “suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecil perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, log size, nilai pasar saham dan lain-lain)”.

Menurut Aris Mardiyono dan Gita Sugiarti (2015) ukuran perusahaan sebagai berikut : “Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu”.

Pengembangan Hipotesa

Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap

Penerapan tata kelola perusahaan pada Badan Usaha Milik Negara merupakan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Tata kelola perusahaan ini penting untuk mengatasi masalah keagenan yang dilakukan oleh manajemen. Dalam Keputusan Kementerian BUMN No. 117 tahun 2002 ps.1 disebutkan bahwa tata kelola perusahaan adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Lebih lanjut dalam keputusan kementerian BUMN tersebut disebutkan bahwa BUMN wajib menerapkan *good corporate governance* secara konsisten dan atau menjadikan *good corporate governance* sebagai landasan operasionalnya.

Muslih (2017) menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa usaha yang dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk menerapkan tata kelola perusahaan pada BUMN tidak sia-sia. Hal ini berarti penerapan tata kelola perusahaan dapat mendorong kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan ini dapat bentuk laba, peningkatan harga saham dan citra perusahaan.

H₁ : Tata kelola perusahaan berpengaruh positif pada kinerja perusahaan.

Pengaruh Remunerasi Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan

Pemberian remunerasi yang memadai akan mempengaruhi kinerja perusahaan karena pemberian remunerasi akan menyebabkan sumber daya manusia yang termotivasi, semakin produktif dan puas dengan remunerasi yang diberikan maka akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara positif.

Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Pangestu, dkk (2019) mengatakan bahwa ada hubungan positif antara remunerasi direksi terhadap ROA dan ROE, dimana semakin tinggi pemberian remunerasi kepada direksi perusahaan akan membuat ROA dan ROE dari perusahaan yang bersangkutan meningkat.

H₂ : Pemberian remunerasi direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan

Ukuran dalam perusahaan ini diukur dengan melihat seberapa besar asset yang dimiliki oleh perusahaan. Total asset yang dimiliki oleh perusahaan merupakan hak, kewajiban dan modal perusahaan. Oleh karena itu ukuran perusahaan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaporan keuangan.

Perusahaan yang memiliki aset besar biasanya akan mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat dan memiliki kekuatan finansial yang lebih besar dalam menunjang kinerja. Hal ini menyebabkan perusahaan harus menggunakan aset yang dimiliki sebaik mungkin serta lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangannya.

Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Nadeem Sheikh (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan besar mendapatkan manfaat ekonomi yang besar sehingga memberikan dampak yang lebih baik terhadap kinerja perusahaan.

H₃: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Moderasi Jumlah Pertemuan Komite Audit Pada Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan

Pertemuan atau rapat antara komite audit dengan internal audit merupakan salah satu kegiatan yang penting dari komite audit. Dalam koordinasi dan kerjasama antar anggota lebih mudah apabila diadakan pertemuan. Dengan diadakannya rapat komite audit maka dapat memperbaiki kinerja beberapa mekanisme *corporate governance*, serta komite audit dapat mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan oleh manajemen karena aktivitas pengendalian internal dilakukan secara terus menerus. Dalam penelitian terdahulu telah menunjukkan pengaruh jumlah pertemuan komite audit terhadap kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Arief Effendi (2013) mengatakan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan karena tugas komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk menjalankan tugas dan fungsi dewan komisaris.

H₄ : Jumlah pertemuan komite audit memperkuat pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan.

Moderasi Jumlah Pertemuan Komite Audit pada Pengaruh Remunerasi Direksi terhadap Kinerja Perusahaan

Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dan dewan direksi dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Dengan adanya remunerasi direksi maka dewan direksi akan melakukan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh – sungguh, menerapkan pertemuan komite audit untuk mencari solusi terhadap masalah yang sedang terjadi dalam pihak manajemen sehingga dengan adanya pertemuan komite audit yang dilakukan setiap ada masalah, maka frekuensi pertemuan komite audit akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dalam hal ini pemberian remunerasi direksi tidak akan sia – sia karena penerapan pertemuan komite audit dilakukan oleh dewan direksi dengan konsisten. Dalam penelitian terdahulu telah menunjukkan pengaruh jumlah pertemuan komite audit terhadap kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Annastacya Maria Bonita dan H. Raharja (2014) menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.

H₅: Jumlah pertemuan komite audit memperkuat pengaruh remunerasi direksi terhadap kinerja perusahaan.

Moderasi Jumlah Pertemuan Komite Audit pada Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan

Pertemuan komite audit yang dilakukan dewan komisaris dapat membantu meningkatkan ukuran perusahaan yang di proksi dengan total aset, karena adanya rapat pertemuan yang

dilakukan dewan komisaris dengan pihak manajemen dapat mendiskusikan masalah – masalah keuangan pada perusahaan sehingga tidak terjadi penurunan total aset, serta dalam rapat pertemuan komite audit ini dapat mendiskusikan apa yang harus dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar total aset yang di miliki perusahaan maka semakin tinggi juga kelangsungan usaha perusahaan tersebut dengan meningkatkan kinerja keuangan yang dapat membuat perusahaan berkembang.

Dalam penelitian terdahulu telah menunjukkan pengaruh jumlah pertemuan komite audit terhadap kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Aga Arye Perdana (2019) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak frekuensi rapat komite audit, maka semakin tinggi peluang terjadinya praktek manajemen laba pada suatu perusahaan.

H6 : Jumlah pertemuan komite audit memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Operasional variabel perlu digunakan untuk menentukan jenis dan indikator variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menganalisis secara empiris mengenai pengaruh tata kelola perusahaan, remunerasi direksi dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan yang di moderasi dengan jumlah pertemuan komite audit.

Table 1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Variabel X1 Tata Kelola Perusahaan (CGC)	<i>Good Corporate Governance</i> merupakan susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manager, kreditor, pemerintah, karyawan dan <i>stakeholder internal</i> dan <i>eskternal</i> yang lain sesuai hak dan tanggungjawab	GCG = Hasil <i>assessment corporate governance</i> oleh <i>external assessor CG</i>	Rasio
Variabel X2 Remunerasi Direksi	Remunerasi Direksi merupakan imbalan atau balas jasa terhadap kinerja perusahaan	Remunerasi Direksi = Nilai Kompensasi Tahunan	Rasio
Variabel X3 Ukuran Perusahaan	Ukuran Perusahaan merupakan skala besar atau kecil perusahaan dinyatakan dengan total asset	Ukuran Perusahaan (Size) = Total Asset	Rasio
Variabel	Komite Audit di ukur dengan Jumlah	Jumlah Pertemuan	Rasio

X4 (Moderasi) Komite Audit	pertemuan komite yang dilakukan setiap tahunnya	Komite Audit = Jumlah Rapat Komite Audit	
Variabel Y Kinerja Perusahaan (ROA)	Kinerja perusahaan ini di ukur dengan ROA . ROA merupakan hasil perbandingan antara laba bersih perusahaan dengan total aset perusahaan	ROA = Laba Bersih / Total Aset	Rasio

Dalam penelitian ini ada 3 (tiga) variabel yaitu *Independent variable*, variabel pemoderasi, dan 1 (satu) variabel dependen.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN bidang keuangan non publik mulai tahun 2012 sampai dengan 2018. Unit analisis yang digunakan adalah perusahaan BUMN. Sampel dari penelitian ini adalah tata kelola perusahaan, remunerasi direksi, dan ukuran perusahaan dari 7 (tujuh) perusahaan asuransi BUMN non publik periode 2012 sampai dengan 2018.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Perusahaan diseleksi dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan asuransi BUMN *non public* yang menerbitkan laporan keuangan selama 1 tahun
2. Perusahaan asuransi BUMN *non public* mempublikasikan laporan keuangan tahunannya secara rutin dari tahun 2012 sampai dengan 2018
3. Perusahaan memiliki data yang lengkap untuk penelitian dan memiliki laba bersih (laba setelah pajak) yang positif selama periode 2012 sampai dengan 2018.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, dimana sumber datanya diperoleh secara tidak langsung dari pihak kedua ketiga atau seterusnya kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang tersedia di Laporan Tahunan perusahaan. Pemilihan data dilakukan secara non random (*purposive*), seperti data tata kelola perusahaan, remunerasi direksi, dan ukuran perusahaan dari perusahaan bidang keuangan BUMN non publik.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Pengolahan data menggunakan program Eviews 9. Pengolahan statistik dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

Sebelum dilakukan pengolahan data maka dilakukan uji asumsi klasik terhadap data yang akan digunakan. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji serial correlation. Alat analisis yang digunakan adalah soft eviews 9. Indikator normalitas data adalah indikator jarqua bera.

Menurut Ghozoli (2018) koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel – variabel dependen. Uji ini digunakan untuk mengetahui berapa persen variasi dari variabel Dependen dapat dijelaskan oleh variabel Independen. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap naik turunnya variabel tidak bebas dilakukan uji nilai R^2 terletak diantara 0 dan 1, dimana semakin besar nilai R^2 berarti bahwa variabel bebas yang dipilih dapat menjelaskan variabel tidak bebas.

Uji F dan uji t

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas (independent) yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel terikat (dependen). Dengan taraf signifikansi 5% Jika hasil P value < 5% ditolak (signifikan). Jika nilai $P > 5\%$ diterima (tidak signifikan).

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh masing – masing variabel bebas (*independent*) secara parsial terhadap variabel terikat (dependen). Pengujian nilai t sering disebut uji koefisien regresi secara parsial. Pengujian ini untuk mengetahui seberapa jauh signifikan masing – masing variabel dengan taraf signifikan 5%.

Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen (Y) dan variabel Independen (X1, X2 dan X3). Persamaan regresi linear sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta x_1 + \beta x_2 + \beta x_3 + e$$

Y = Variabel terikat atau response

X = Variabel bebas atau predictor

α = Konstanta

β = Slope atau koefisien estimate

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dependent Variable: LABA
Method: Least Squares
Date: 05/27/20 Time: 15:03
Sample: 1 49
Included observations: 49

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.581196	5.708582	-1.152860	0.2555
CG	0.045040	0.031409	1.433969	0.1590
REMUNDIR	0.110510	0.263356	0.419622	0.6769
UKPER	0.778021	0.128153	6.071009	0.0000
JPKA_CG	1.51E-09	9.78E-10	1.549517	0.1288
JPKA_REMUNDIR	5.81E-13	6.51E-13	0.891883	0.3775
JPKA_UKPER	9.38E-12	5.49E-11	0.170729	0.8653
R-squared	0.803457	Mean dependent var	13.31799	
Adjusted R-squared	0.775379	S.D. dependent var	1.930138	
S.E. of regression	0.914773	Akaike info criterion	2.791282	
Sum squared resid	35.14602	Schwarz criterion	3.061543	
Log likelihood	-61.38642	Hannan-Quinn criter.	2.893819	
F-statistic	28.61555	Durbin-Watson stat	0.756303	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Variabel tata kelola perusahaan (X1) menunjukkan pada koefisien alpha 5% (t-Stat = 1.433969 dan prob 0.1590). Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Artinya tata kelola perusahaan tidak berpengaruh pada kinerja perusahaan. Variabel remunerasi direksi (X2) menunjukkan pada koefisien alpha 5% (t-Stat = 0.419622) dan prob 0.6769. Hal ini menunjukkan bahwa variabel remunerasi direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada alpha 5%. Artinya remunerasi direksi tidak berpengaruh pada kinerja perusahaan.

Variabel ukuran perusahaan (X3) menunjukkan pada koefisien alpha 5% (t-Stat = 6.071009) dan prob 0.0000 . Hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan pada alpha 5%. Artinya ukuran perusahaan berpengaruh pada kinerja perusahaan.

Variabel moderasi jumlah pertemuan komite audit (X1) menunjukkan pada koefisien alpha 5% (t-Stat = 1.549517) dan prob 0.1288. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah pertemuan komite audit tidak memoderasi tata kelola perusahaan pada kinerja perusahaan pada alpha 5%. Artinya variabel jumlah pertemuan komite audit tidak memoderasi pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan.

Variabel moderasi jumlah pertemuan komite audit (X2) menunjukkan pada koefisien alpha 5% (t-Stat = 0.891883) dan prob 0.3775. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah pertemuan komite audit tidak memoderasi pengaruh remunerasi pada kinerja perusahaan.

Artinya variabel jumlah pertemuan komite audit tidak memoderasi pengaruh remunerasi direksi pada kinerja perusahaan.

Variabel moderasi jumlah pertemuan komite audit (X3) menunjukkan pada koefisien alpha 5% (t-Stat = 0.170729) dan prob 0.8653. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah pertemuan komite audit tidak memoderasi pengaruh variabel ukuran perusahaan pada kinerja perusahaan pada alpha 5%. Artinya variabel jumlah pertemuan komite audit tidak memoderasi pengaruh ukuran perusahaan pada kinerja perusahaan.

Pembahasan

Penelitian ini menguji variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja perusahaan yaitu tata kelola perusahaan, remunerasi direksi, ukuran perusahaan, dan moderasi jumlah pertemuan komite audit.

Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan

lent Variable: LABA

Method: Least Squares

Date: 05/27/20 Time: 15:03

Sample: 1 49

Included observations: 49

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.581196	5.708582	-1.152860	0.2555
CG	0.045040	0.031409	1.433969	0.1590
R-squared	0.803457	Mean dependent var		13.31799
Adjusted R-squared	0.775379	S.D. dependent var		1.930138
S.E. of regression	0.914773	Akaike info criterion		2.791282
Sum squared resid	35.14602	Schwarz criterion		3.061543
Log likelihood	-61.38642	Hannan-Quinn criter.		2.893819
F-statistic	28.61555	Durbin-Watson stat		0.756303
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dari tabel di atas terlihat bahwa hasil uji X1 yaitu tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan menunjukkan t-statistic 1.433969 dan probnya 0.1590 > 0.05 tidak signifikan. Artinya Variabel X1 mempunyai

pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini kemungkinan *Return*

on Asset (ROA) terhadap perusahaan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Selain itu kemungkinan yang terjadi *good corporate governance* lebih bersifat jangka panjang sehingga tidak bisa diukur dengan waktu yang singkat, sedangkan ROA bersifat jangka pendek dimana hasil yang dicapai dapat langsung dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN juga tidak mendorong kinerja perusahaan karena penerapannya masih sebatas formalitas untuk memenuhi ketentuan pemerintah saja.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Prasinta (2012) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Pengaruh Remunerasi Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan

Dependent Variable: LABA

Method: Least Squares

Date: 05/27/20 Time: 15:03

Sample: 1 49

Included observations: 49

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.581196	5.708582	-1.152860	0.2555
REMUNDIR	0.110510	0.263356	0.419622	0.6769
R-squared	0.803457	Mean dependent var		13.31799
Adjusted R-squared	0.775379	S.D. dependent var		1.930138
S.E. of regression	0.914773	Akaike info criterion		2.791282
Sum squared resid	35.14602	Schwarz criterion		3.061543
Log likelihood	-61.38642	Hannan-Quinn criter.		2.893819
F-statistic	28.61555	Durbin-Watson stat		0.756303
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dari tabel di atas terlihat hasil uji X2 yaitu remunerasi direksi terhadap kinerja perusahaan menunjukkan hasil t-statistic 0.419622 dan probnya 0.6769 > 0.05 tidak signifikan. Artinya variabel X2 mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meningkatkan remunerasi direksi BUMN Bidang keuangan non public belum tentu dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena banyak hal yang dipertimbangkan dalam pemberian remunerasi terhadap karyawan misalnya tingkat pengetahuan dan keahlian harus di miliki karyawan. Pemberian remunerasi ini juga tidak menjamin direksi melakukan tugasnya dengan lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan demikian bila remunerasi ditingkatkan maka tidak akan menaikkan kinerja perusahaan. *Agency problems* antara pemilik dengan manager tidak akan berkurang bila tidak didukung perangkat – perangkat tata kelola yang memadai.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Muslih (2017) menyatakan bahwa remunerasi direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan

Dependent Variable: LABA

Method: Least Squares

Date: 05/27/20 Time: 15:03

Sample: 1 49

Included observations: 49

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.581196	5.708582	-1.152860	0.2555
UKPER	0.778021	0.128153	6.071009	0.0000
R-squared	0.803457	Mean dependent var		13.31799
Adjusted R-squared	0.775379	S.D. dependent var		1.930138
S.E. of regression	0.914773	Akaike info criterion		2.791282
Sum squared resid	35.14602	Schwarz criterion		3.061543
Log likelihood	-61.38642	Hannan-Quinn criter.		2.893819
F-statistic	28.61555	Durbin-Watson stat		0.756303
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dari tabel di atas terlihat hasil uji X3 yaitu ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan menunjukkan hasil t-statistic 6.071009 dan probnya $0.0000 < 0.05$ signifikan. Artinya variabel X3 mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar nilai ukuran perusahaan maka dapat diprediksi kinerja perusahaan akan meningkat. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini di proksi total asset, dimana total asset menggambarkan nilai kekayaan suatu perusahaan, sehingga bisa dikatakan besar kecilnya ukuran perusahaan dapat dilihat dari besar kecilnya nilai total asset suatu perusahaan. Dalam hal ini total asset yang dimiliki oleh perusahaan besar maka akan menunjukkan ukuran perusahaan yang berkualitas serta kinerja yang baik sehingga memperoleh profit yang tinggi untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sheikh (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan dan hasil penelitian Tisna dan Agustami (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Ternyata ada peran ukuran terhadap kinerja semakin besar perusahaan maka akan semakin besar modalnya, jumlah karyawan, fasilitasnya dll.

Moderasi Jumlah Pertemuan Komite Audit pada Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan

Dependent Variable: LABA

Method: Least Squares

Date: 05/27/20 Time: 15:03

Sample: 1 49

Included observations: 49

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.581196	5.708582	-1.152860	0.2555
JPKA_CG	1.51E-09	9.78E-10	1.549517	0.1288
R-squared	0.803457	Mean dependent var		13.31799
Adjusted R-squared	0.775379	S.D. dependent var		1.930138
S.E. of regression	0.914773	Akaike info criterion		2.791282
Sum squared resid	35.14602	Schwarz criterion		3.061543
Log likelihood	-61.38642	Hannan-Quinn criter.		2.893819
F-statistic	28.61555	Durbin-Watson stat		0.756303
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dari tabel di atas terlihat hasil uji X4 yaitu moderasi jumlah pertemuan komite audit pada tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan menunjukkan hasil t-statistic 1.549517 dan Probnya 0.1288 > 0.05 tidak signifikan. Artinya Variabel X4 memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini memungkinkan bahwa perusahaan memandang peraturan pembentukan rapat komite audit hanya sebagai kewajiban, sehingga kinerja dan pengawasan dari komite audit belum berjalan secara maksimal. Selain itu ada kemungkinan lain bahwa pertemuan komite audit yang dilakukan oleh komite audit tidak berfokus pada penerapan tata kelola yang baik terhadap perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Muslih (2019) menyatakan bahwa jumlah pertemuan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Moderasi Jumlah Pertemuan Komite Audit pada Pengaruh Remunerasi Direksi terhadap Kinerja Perusahaan

Dependent Variable: LABA

Method: Least Squares

Date: 05/27/20 Time: 15:03

Sample: 49

Included observations: 49

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.581196	5.708582	-1.152860	0.2555
JPKA_REMUNDER	5.81E-13	6.51E-13	0.891883	0.3775
R-squared	0.803457	Mean dependent var		13.31799
Adjusted R-squared	0.775379	S.D. dependent var		1.930138
S.E. of regression	0.914773	Akaike info criterion		2.791282
Sum squared resid	35.14602	Schwarz criterion		3.061543
Log likelihood	-61.38642	Hannan-Quinn criter.		2.893819
F-statistic	28.61555	Durbin-Watson stat		0.756303

Prob(F-statistic) 0.000000

Dalam tabel diatas terlihat hasil uji X5 yaitu moderasi jumlah pertemuan komite audit pada pengaruh remunerasi direksi terhadap kinerja perusahaan menunjukkan hasil t-statistic 0.891883 dan Probnya $0.3775 > 0.05$ tidak signifikan. Artinya variabel X5 memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini memungkinkan bahwa pemberian remunerasi dalam melaksanakan rapat komite audit untuk membahas masalah – masalah yang terjadi pada perusahaan belum tentu meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu Hipotesa H5 ditolak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Adiyati dkk (2017) dijelaskan bahwa jumlah pertemuan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Moderasi Jumlah Pertemuan Komite Audit pada Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan

Dependent Variable: LABA
 Method: Least Squares
 Date: 05/27/20 Time: 15:03
 Sample: 1 49
 Included observations: 49

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.581196	5.708582	-1.152860	0.2555
JPKA_UKPER	9.38E-12	5.49E-11	0.170729	0.8653
R-squared	0.803457	Mean dependent var		13.31799
Adjusted R-squared	0.775379	S.D. dependent var		1.930138
S.E. of regression	0.914773	Akaike info criterion		2.791282
Sum squared resid	35.14602	Schwarz criterion		3.061543
Log likelihood	-61.38642	Hannan-Quinn criter.		2.893819
F-statistic	28.61555	Durbin-Watson stat		0.756303
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dalam tabel diatas terlihat hasil uji X6 yaitu moderasi jumlah pertemuan komite pada pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan menunjukkan hasil t-statistic 0.170729 dan Probnya $0.8653 > 0.05$ tidak signifikan. Artinya variabel X6 memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini memungkinkan pertemuan rapat yang diadakan komite audit tidak menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mengawasi dan memeriksa laporan keuangan perusahaan, serta tidak membahas bagaimana meningkatkan pendapatan untuk meningkatkan total aset bagi perusahaan, sehingga pertemuan rapat komite audit tidak efektif dan bahkan menambah biaya keagenan, maka oleh karenanya H6 tidak terima/ ditolak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunizar dan Rahardjo (2014) yang menyatakan bahwa pertemuan komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja BUMN non publik dengan menggunakan sampel sebanyak 7 (tujuh) perusahaan per tahun untuk periode 2012 sampai dengan 2018. Dari hasil analisis dan pembahasan data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Remunerasi Direksi, Ukuran Perusahaan, dan Moderasi Jumlah Pertemuan Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan, dengan regresi linear berganda maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Tata kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan BUMN bidang keuangan non publik. Hipotesa 1 tidak terbukti dengan probabilitas $0.1590 > 0.05$. Hipotesa 1 ditolak.
2. Remunerasi direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja BUMN bidang keuangan non publik. Hipotesa 2 tidak terbukti dengan probabilitas $0.6769 > 0.05$. Hipotesa 2 ditolak.
3. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja BUMN bidang keuangan non publik. Hipotesa 3 terbukti dengan probabilitas $0.000 < 0.05$. Hipotesa 3 diterima.
4. Jumlah pertemuan komite audit tidak memperkuat pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Hipotesa 4 tidak terbukti dengan probabilitas $0.1288 > 0.05$. Hipotesa 4 ditolak.
5. Jumlah pertemuan komite audit tidak memperkuat pengaruh remunerasi direksi terhadap kinerja perusahaan. Hipotesa 5 tidak terbukti dengan nilai probabilitas $0.3775 > 0.05$. Hipotesa 5 ditolak.
6. Jumlah pertemuan komite audit tidak memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Hipotesa 6 tidak terbukti dengan nilai probabilitas $0.8653 > 0.05$. Hipotesa 6 ditolak.

Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan simpulan per hipotesa adalah sebagai berikut:

1. Kementerian BUMN agar meningkatkan pembinaan implementasi *Good Corporate Governance* pada BUMN bidang keuangan non publik dan melakukan *assessment* secara berkala.
2. Peningkatan remunerasi direksi dan komisaris agar dilakukan bila tata kelola BUMN tidak bagus dan dipahami dampaknya pada peningkatan kinerja.
3. Kementerian BUMN agar membuat aturan yang lebih baik tentang pertemuan – pertemuan komite audit sehingga lebih bermanfaat dan berdampak pada peningkatan kinerja.
4. Kementerian BUMN agar mengusulkan penambahan modal pemerintah pada beberapa BUMN yang membutuhkan sehingga *economic of scale* meningkat.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa peningkatan remunerasi direksi tidak akan meningkatkan kinerja perusahaan bila tata kelolanya tidak baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiati, Y., & Adiwibowo, A. S. (2017). Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(4).
- Agustina, C., & Mulyani, S. D. (2017). Pengaruh Remunerasi Dewan Direksi Leverage Dan Efektivitas Komite Audit Terhadap Kualitas Laba Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 4(2).
- Bonita, A. M., & Raharja, H. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Praktik Manajemen Laba. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3).
- Effendi, M. A. (2017). *The Power Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta Salemba Empat.
- Fahmi, Irham. (2014). *Analisa Kinerja Keuangan*. Bandung :Alfabeta.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate* (Edisi 8). Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Hanafi, M. M. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Hartono, Jogiyanto. (2016). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi* (Edisi Kelima).Yogyakarta: BPFE.
- Hery, S.E., M.Si., (2017). *Kajian Riset Akuntansi*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hery, SE., M. Si, (2016). *Financial Ratio For Business*. Jakarta : PT Grasindo.
- Kementerian BUMN. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER — 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Negara.
- Kementerian BUMN. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara.
- Kementerian BUMN. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012. Tentang Organ Pendukung Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara.
- Lukviarman, Niki.(2016). *Corporate Governance: Menuju Penguatan Konseptual dan Implementasi di Indonesia*. PT Era Adicitra Intermedia.
- Mardiyono A, Sugiarti G.(2015). “Analisis Kinerja Pemasaran Pada Industri” Kreatif di Kota Semarang. *Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.
- Muhammad, Abdul . K. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muslih, Mochamad. (2019). Pengaruh Organ Komisaris Terhadap Kinerja BUMN Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang Masuk Klasifikasi LQ 45. *Forum Keuangan Dan Bisnis Indonesia*.
- Muslih, Mochamad, Dedi (2019). Tata Kelola Berkelanjutan Bagi BUMN Bidang Keuangan Non Publik. *Firm Journal of Management Studies*, 4(2).
- Muslih, M. (2019). The Committee Of Audit Rule On The State -Owned Enterprises (BUMN) Performance Of Indonesia Registered On The Stock Exchange Of Indonesia. *International Journal of Contemporary Accounting*, 1(2).
- Nurchahya, A. S., Wahyuni, E. D., & Setyawan, S. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1).

- Pangestu, A. P., Agustia, S., & Rachman, R. A. (2019). Pengaruh Pemberian Remunerasi Direksi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia. *Studi Akuntansi & Keuangan Indonesia*, 2(1).
- Perdana, A. A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Leverage dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Yang Terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Sakti*, 8(1).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Prasinta, D. (2012). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan. *Accounting Analysis Journal*, 1(2).
- Riyanto, Bambang. (2012). *Dasar - dasar Pembelajaran Perusahaan*. Yogyakarta: GPFE.
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory* (Edisi 7 (ed.)). Pearson Canada Inc.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sukandar, P. P., & Rahardja. (2014). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3).
- Suwito, E., & Herawaty, A. (2015). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Nilai Pasar terhadap Harga Saham. *Jurnal Admisnistrasi Bisnis*, 56(1).
- Tisna, G. A., & Agustami, S. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2014). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2).
- Tertius, M. A., & Christiawan, Y. J. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan. *Business Accounting Review*, 3(1).
- Yunizar, R. I., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(4).

Biodata Penulis

Penulis 1: Alumni STIE Tri Bhakti.

Penulis 2: Dosen Tetap Prodi Akuntansi di STIE Tri Bhakti .